

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN MELALUI KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI KABUPATEN NABIRE

Irwan Dwi Saputra¹

irwnsaputra316@gmail.com

Agustina Sanggrangbano²

inasanggrangbano@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of economic growth on poverty in Nabire Regency with the quality of human development measured by the Human Development Index (HDI) as an intervening variable. Using a quantitative approach with secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS) for the period 2010 to 2023, the analytical methods employed are multiple regression analysis, path analysis, and the Sobel test to examine the significance of HDI's mediating role. The results show that GRP has a positive and significant effect on HDI (0.967), GRP has a negative and significant direct effect on poverty (-0.853), and HDI has a negative and significant effect on poverty (-0.783). The Sobel test proves that HDI acts as a significant intervening variable with a test statistic value of -4.133 and a p-value of 0.000. The indirect effect of GRP on poverty through HDI reaches -0.757, making the total effect of GRP on poverty -1.610. This means that nearly half (approximately 47 percent) of the total effect of economic growth on poverty reduction is channeled through improvements in the quality of human development.

Keywords: Economic Growth, Poverty, Quality of Human Development, Path Analysis

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan finansial, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta lapangan kerja. Oleh karena itu, memahami akar permasalahan kemiskinan memerlukan landasan teoretis yang kuat. Secara teoretis, teori pertumbuhan ekonomi Solow (1956) menyatakan bahwa peningkatan modal, tenaga kerja, dan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, teori kemiskinan Arthur Lewis, yang sering dikenal dengan Model Dua Sektor (Lewis Dual-Sector Model), merupakan salah satu pilar dalam ekonomi pembangunan. Lewis (1954) memandang kemiskinan bukan sekadar masalah kekurangan uang, melainkan hasil dari struktur ekonomi yang tidak seimbang antara sektor tradisional dan modern. Melengkapi kedua pandangan tersebut, Sen (1999) dalam teori pembangunan manusia menambahkan bahwa kesejahteraan sejati harus diukur dari kapabilitas individu, yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Dari ketiga kerangka teoretis ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting yang merefleksikan kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dengan demikian, secara konseptual, hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, dan kemiskinan bersifat dinamis dan saling terkait.

Sejalan dengan kerangka teoretis tersebut, berbagai penelitian empiris telah dilakukan untuk menguji hubungan antara pertumbuhan ekonomi, IPM, pengangguran, dan kemiskinan, meskipun hasilnya menunjukkan variasi yang cukup besar antar wilayah. Misalnya, Angelia, Hasugian, & Suharianto (2025) di Provinsi Sumatera Utara menemukan bahwa secara parsial hanya PDRB yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sementara pengangguran dan IPM tidak menunjukkan pengaruh signifikan, namun secara simultan ketiganya berkontribusi sebesar 83,63

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

² Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

persen. Berbeda dengan temuan tersebut, Susanti (2013) di Jawa Barat justru menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti semakin tinggi PDRB justru meningkatkan kemiskinan, sementara IPM berpengaruh negatif dan signifikan. Temuan yang kontradiktif ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan, melainkan sangat tergantung pada konteks lokal dan distribusi hasil pembangunan.

Lebih lanjut, Amar & Arkum (2024) di Kabupaten Bangka menunjukkan bahwa PDRB dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh positif tetapi tidak signifikan karena para penganggur umumnya bukan berasal dari kalangan miskin melainkan sedang mencari pekerjaan yang lebih sesuai. Sementara itu, Andykha, Handayani, & Woyanti (2018) di Provinsi Jawa Tengah memperkuat temuan bahwa laju pertumbuhan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata dan cenderung didominasi golongan berpendapatan tinggi, sementara IPM berpengaruh negatif dan signifikan. Nasrulloh (2025) di Kabupaten Sampang menemukan bahwa PDRB berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan IPM berpengaruh negatif dan signifikan sebagai faktor yang lebih dominan. Hasil-hasil ini semakin memperkuat dugaan bahwa IPM sering kali memainkan peran yang lebih langsung dalam menurunkan kemiskinan dibandingkan pertumbuhan ekonomi semata.

Hal tersebut juga terbukti dalam penelitian Widyantoro & Agustin (2025) di 34 provinsi Indonesia periode 2019-2023 dengan pendekatan Random Effect Model, yang hanya menemukan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sementara PDRB, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia memainkan peran yang lebih vital dibandingkan pertumbuhan ekonomi atau kebijakan upah saja. Namun demikian, hasil yang berbeda justru ditemukan oleh Purnama dkk. (2025) di Provinsi Lampung, yang menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sementara pendidikan dan pengangguran berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Sayifullah & Gandasari (2016) di Provinsi Banten juga menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan tingkat pengangguran tidak signifikan karena sebagian penganggur bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang masih memadai.

Penelitian Ilmi (2021) di lima provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia (Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan, sementara PDRB dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan. Sari (2024) di Jawa Timur dengan perspektif ekonomi Islam menemukan bahwa PDRB dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan IPM berpengaruh negatif dan signifikan sebagai variabel paling berpengaruh. Terakhir, Roseline (2023) di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa PDRB per kapita dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan, sementara tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Secara keseluruhan, beragamnya hasil studi empiris tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi, IPM, pengangguran, dan kemiskinan sangat bergantung pada karakteristik wilayah, periode waktu, metode analisis, serta konteks sosial-ekonomi setempat. Oleh karena itu, generalisasi hasil dari satu wilayah ke wilayah lain perlu dilakukan dengan hati-hati, dan penelitian lebih lanjut pada wilayah spesifik seperti Kabupaten Nabire menjadi sangat relevan.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Nabire menjadi sangat menarik dan relevan untuk dikaji lebih mendalam mengingat kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan yang cukup mencolok. Meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nabire menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari Rp4,09 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp8,15 triliun pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di daerah ini masih tergolong tinggi, yakni hanya turun dari 33,68 persen menjadi 23,35 persen dalam periode yang sama. Di sisi lain, IPM memang mengalami peningkatan dari 64,49 menjadi 70,84, namun angkanya masih relatif rendah jika dibandingkan dengan daerah lain. Kondisi ini secara nyata mengindikasikan adanya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai peran IPM sebagai variabel yang memediasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Dengan kata lain, apakah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nabire telah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas

pembangunan manusia, dan selanjutnya apakah peningkatan IPM tersebut benar-benar berdampak pada penurunan kemiskinan, menjadi pertanyaan kunci yang perlu dijawab.

Berdasarkan latar belakang teoretis yang menekankan pentingnya kapabilitas individu, temuan-temuan empiris yang beragam dan saling melengkapi, serta fenomena ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan di Kabupaten Nabire, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan melalui variabel intervening kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Nabire. Pertanyaan ini menjadi sentral karena menjawab tidak sekadar apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan, tetapi lebih jauh bagaimana mekanisme pengaruh tersebut bekerja melalui peningkatan kapabilitas masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi menarik untuk diangkat karena secara nyata menunjukkan kompleksitas hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Nabire. Di tengah peningkatan PDRB yang signifikan, tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan IPM yang relatif rendah memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan tanpa disertai peningkatan kualitas pembangunan manusia. Dengan menjadikan kualitas pembangunan manusia sebagai variabel intervening, penelitian ini mampu menjawab kesenjangan antara harapan teori dan realitas di lapangan.

METODE PENELITIAN

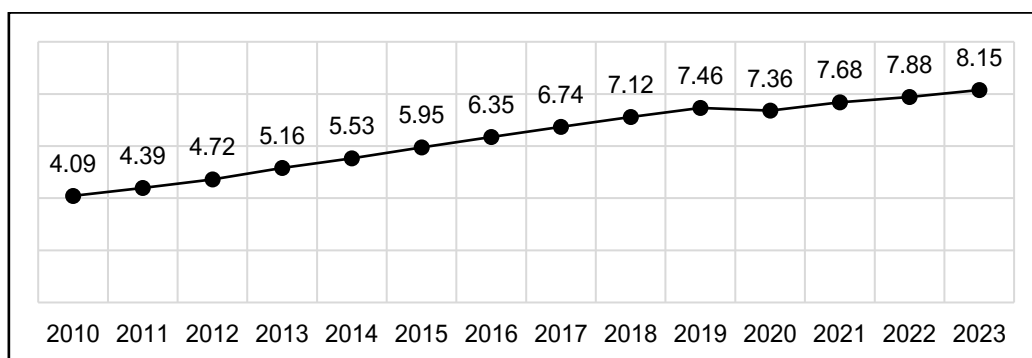
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan ruang lingkup di Kabupaten Nabire, menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 2010 hingga 2023 yang mencakup tiga indikator utama, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat kemiskinan. Teknik pengambilan data dilakukan melalui analisis dokumen dan laporan resmi, dilanjutkan dengan verifikasi data. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan analisis jalur (path analysis) yang diterapkan dalam dua tahap, yaitu regresi PDRB terhadap IPM dan regresi IPM terhadap tingkat kemiskinan. Untuk menguji signifikansi peran IPM sebagai variabel mediasi, penelitian ini menggunakan uji Sobel (Sobel test) yang bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh tidak langsung PDRB terhadap kemiskinan melalui IPM signifikan secara statistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Variabel Penelitian

Sebelum membahas lebih jauh mengenai hasil analisis pengaruh antar variabel, penting untuk memahami terlebih dahulu gambaran umum perkembangan masing-masing variabel selama periode penelitian, yaitu dari tahun 2010 hingga 2023. Ketiga variabel utama dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kualitas pembangunan manusia, dan tingkat kemiskinan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nabire.

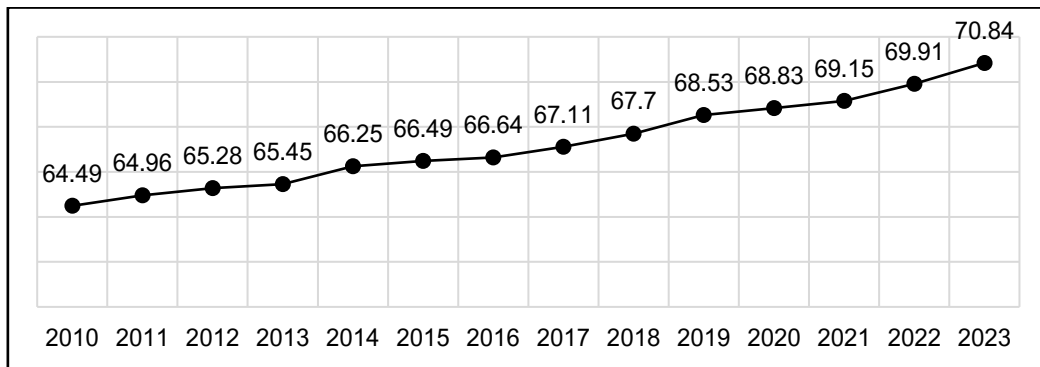
Gambar 1. Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Nabire Tahun 2010-2023 (triliun rp)



Sumber : BPS Kabupaten Nabire, data diolah (2024)

Perkembangan PDRB di Kabupaten Nabire menunjukkan tren yang positif dan konsisten selama periode 2010 hingga 2023. Pada tahun 2010, nilai PDRB tercatat sebesar Rp4,09 triliun, kemudian secara bertahap meningkat setiap tahunnya hingga mencapai Rp8,15 triliun pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di daerah tersebut, yaitu sebesar 5,44% per tahun. Secara nominal, PDRB Kabupaten Nabire hampir mengalami peningkatan sebesar dua kali lipat dalam kurun waktu 14 tahun. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini idealnya menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta menyediakan layanan publik yang lebih baik. Namun, peningkatan PDRB saja belum cukup untuk menggambarkan seberapa besar manfaat ekonomi tersebut dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin.

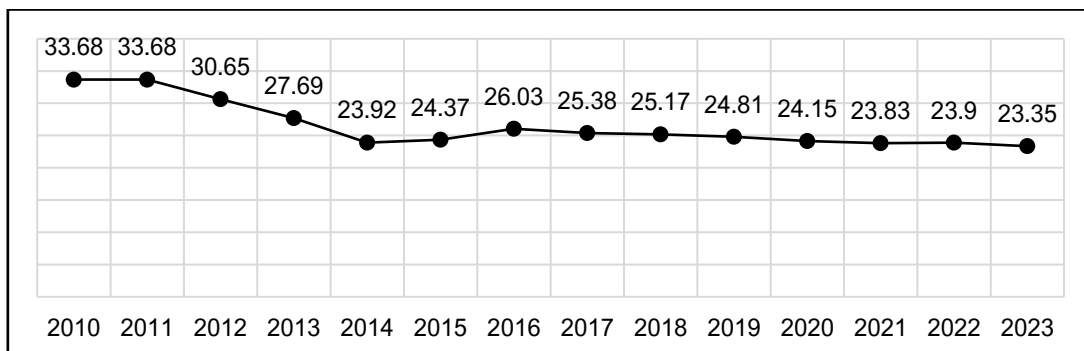
Gambar 2. Perkembangan IPM Kabupaten Nabire Tahun 2010-2023 (indeks)



Sumber : BPS Kabupaten Nabire, data diolah (2024)

Sementara itu, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Nabire juga menunjukkan tren peningkatan, meskipun dengan laju yang relatif lambat. Pada tahun 2010, IPM berada pada angka 64,49 poin, yang tergolong dalam kategori pembangunan manusia sedang. Selama periode 14 tahun, IPM terus meningkat hingga mencapai 70,84 poin pada tahun 2023, dengan kata lain mengalami kenaikan sekitar 0,73% per tahun. Peningkatan IPM ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat, terutama yang tercermin dari tiga dimensi utama penyusunnya, yaitu kesehatan (harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (daya beli masyarakat). Meskipun terjadi peningkatan, capaian IPM Kabupaten Nabire yang masih berada di kisaran 70,84 menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang luas untuk perbaikan, terutama dalam hal akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.

Gambar 3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Nabire Tahun 2010-2023 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Nabire, data diolah (2024)

Adapun perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Nabire menunjukkan tren penurunan, namun angka kemiskinan masih tergolong tinggi. Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 33,68 persen, artinya hampir sepertiga penduduk Kabupaten Nabire hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini kemudian menurun secara bertahap menjadi 23,35 persen pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan sebesar lebih dari 10 persen selama 14 tahun, atau turun -0,79 persen per tahun, namun angka kemiskinan yang masih di atas 23 persen menunjukkan bahwa masih lebih dari satu dari lima penduduk Kabupaten Nabire belum dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak. Penurunan kemiskinan yang terjadi relatif lambat jika dibandingkan dengan peningkatan PDRB yang cukup pesat, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Jika ketiga perkembangan variabel ini dianalisis secara bersama, terlihat adanya hubungan yang saling terkait namun tidak sepenuhnya searah. Peningkatan PDRB yang pesat seharusnya diikuti oleh penurunan kemiskinan yang lebih tajam, tetapi fakta menunjukkan bahwa meskipun PDRB naik hampir dua kali lipat, kemiskinan hanya turun sekitar 10 poin persentase. Di sisi lain, peningkatan IPM yang terjadi secara perlahan mungkin menjadi salah satu faktor penyebab lambatnya penurunan kemiskinan. Hal ini karena IPM mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta dari pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang memadai cenderung tidak akan mampu menekan kemiskinan secara efektif.

Fenomena ini menjadi dasar penting untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai sejauh mana pengaruh PDRB terhadap IPM, serta bagaimana peran IPM dalam memediasi hubungan antara PDRB dan kemiskinan. Apakah peningkatan PDRB benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan IPM? Dan apakah peningkatan IPM kemudian berdampak pada penurunan kemiskinan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab melalui analisis regresi dan analisis jalur yang disajikan pada tabel-tabel berikutnya, dimulai dari Tabel 1 yang menguji pengaruh PDRB terhadap IPM.

2. Analisis Jalur

Tabel 1 berikut ini menyajikan hasil analisis regresi mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel independen terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen di Kabupaten Nabire selama periode 2010 hingga 2023.

Tabel 1. Model Jalur I : PDRB → IPM

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t-stat	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	58.4692	0.6838		85.5064	0.0000
PDRB	1.389	0.1058	0.9669	13.1289	0.0000
R-squared = 0.935 ; F-stat = 172.37 (p-value = 0.000)					
Dependent variable : IPM					

Sumber : data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, persamaan regresi yang terbentuk adalah $IPM = 58,4692 + 1,389 \times PDRB$. Koefisien konstanta sebesar 58,4692 menunjukkan bahwa jika nilai PDRB adalah nol, maka IPM diperkirakan berada pada angka 58,4692. Sementara itu, koefisien regresi PDRB sebesar 1,389 bersifat positif, yang berarti bahwa setiap peningkatan PDRB sebesar satu triliun rupiah akan diikuti oleh peningkatan IPM sebesar 1,389 poin. Arah hubungan yang positif ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan PDRB berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Nabire.

Dari segi kekuatan hubungan, nilai standarized coefficients Beta sebesar 0,9669 menunjukkan bahwa pengaruh PDRB terhadap IPM sangat kuat, hampir mendekati 1. Hal ini berarti bahwa sekitar 96,69 persen variasi dalam IPM dapat dijelaskan oleh variasi dalam PDRB, sementara sisanya

dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai R-squared sebesar 0,935 atau 93,5 persen semakin mengonfirmasi bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik, di mana PDRB mampu menjelaskan sebagian besar perubahan yang terjadi pada IPM selama periode pengamatan.

Signifikansi pengaruh PDRB terhadap IPM dapat dilihat dari nilai t-statistik sebesar 13,1289 dan p-value sebesar 0,0000. Karena nilai p-value jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (atau 5 persen), maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh PDRB terhadap IPM adalah signifikan secara statistik. Dengan kata lain, hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara PDRB dan IPM dapat ditolak. Selain itu, nilai F-statistik sebesar 172,37 dengan p-value 0,000 juga menegaskan bahwa model regresi secara keseluruhan layak dan signifikan.

Secara substantif, temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nabire yang diukur melalui peningkatan PDRB ternyata berdampak positif dan signifikan terhadap perbaikan kualitas pembangunan manusia. Hal ini berarti bahwa ketika perekonomian daerah tumbuh, pemerintah maupun masyarakat memiliki lebih banyak sumber daya untuk dialokasikan pada sektor-sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, serta peningkatan standar hidup layak.

Tabel 2. Model Jalur II : PDRB → Kemiskinan

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t-stat	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	40.707	2.570		15.842	0.000
PDRB	-2.250	0.398	-0.853	-5.658	0.000
R-squared = 0.727 ; F-stat = 32.01 (p-value = 0.000)					
Dependent variable : Miskin					

Sumber : data diolah (2024)

Tabel 2 di atas menyajikan hasil analisis regresi mengenai pengaruh langsung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Nabire selama periode 2010 hingga 2023. Berdasarkan tabel tersebut, persamaan regresi yang terbentuk adalah $Miskin = 40,707 - 2,250 \times PDRB$. Koefisien konstanta sebesar 40,707 menunjukkan bahwa jika nilai PDRB adalah nol, maka tingkat kemiskinan diperkirakan mencapai 40,707 persen. Sementara itu, koefisien regresi PDRB sebesar -2,250 bersifat negatif, yang berarti bahwa setiap peningkatan PDRB sebesar satu triliun rupiah akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan sebesar 2,250 poin persentase. Arah hubungan yang negatif ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi secara langsung berkontribusi terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nabire.

Dari segi kekuatan hubungan, nilai standardized coefficients Beta sebesar -0,853 menunjukkan bahwa pengaruh PDRB terhadap kemiskinan tergolong sangat kuat dan bersifat negatif, dengan nilai absolut 0,853 yang berarti sekitar 85,3 persen variasi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi dalam PDRB. Nilai R-squared sebesar 0,727 atau 72,7 persen menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki kemampuan prediksi yang baik, di mana PDRB mampu menjelaskan hampir tiga perempat dari perubahan yang terjadi pada tingkat kemiskinan selama periode pengamatan 2010 hingga 2023. Sisa sebesar 27,3 persen lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar model seperti kebijakan pemerintah, distribusi pendapatan, dan akses terhadap layanan sosial.

Signifikansi pengaruh PDRB terhadap kemiskinan dapat dilihat dari nilai t-statistik sebesar -5,658 dan p-value sebesar 0,000. Karena nilai p-value jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh PDRB terhadap kemiskinan adalah signifikan secara statistik. Nilai F-statistik sebesar 32,01 dengan p-value 0,000 juga menegaskan bahwa model regresi secara keseluruhan layak dan signifikan. Secara substantif, temuan ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDRB secara langsung mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Nabire, sehingga kebijakan pro-pertumbuhan ekonomi tetap relevan dan penting untuk terus dijalankan, meskipun pemerintah daerah juga perlu memperhatikan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi kemiskinan.

Analisis regresi berikutnya yang dilakukan adalah pada jalur ketiga, yaitu pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan, dengan hasilnya sebagai berikut.

Tabel 3. Model Jalur III : IPM → Kemiskinan

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t-stat	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	123.193	22.2196		5.5444	0.0001
IPM	-1.438	0.3302	-0.7826	-4.3547	0.0009
R-squared = 0.612 ; F-stat = 18.96 (p-value = 0.001)					
Dependent variable : Miskin					

Sumber : data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 3 di atas, persamaan regresi untuk jalur ketiga ini yang terbentuk adalah $Miskin = 123,193 - 1,438 \times IPM$. Koefisien konstanta sebesar 123,193 menunjukkan bahwa tanpa adanya pembangunan manusia yang baik, kemiskinan akan berada pada tingkat yang ekstrem. Sementara itu, koefisien regresi IPM sebesar -1,438 bersifat negatif, yang berarti bahwa setiap peningkatan IPM sebesar satu poin akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1,438 poin persentase. Arah hubungan yang negatif ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak), maka semakin rendah tingkat kemiskinan di Kabupaten Nabire.

Dari segi kekuatan hubungan, nilai *standardized coefficients* Beta sebesar -0,783 menunjukkan bahwa pengaruh IPM terhadap kemiskinan tergolong kuat dan bersifat negatif, dengan nilai absolut 0,783 yang berarti sekitar 78,3 persen variasi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi dalam IPM. Nilai *R-squared* sebesar 0,612 atau 61,2 persen menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki kemampuan prediksi yang cukup baik, di mana lebih dari separuh variabilitas dalam tingkat kemiskinan mampu dijelaskan oleh variabel IPM. Sisa sebesar 38,8 persen lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar model seperti kebijakan pemerintah, stabilitas ekonomi, atau faktor eksternal lainnya.

Signifikansi pengaruh IPM terhadap kemiskinan dapat dilihat dari nilai *t*-statistik sebesar -4,355 dan *p*-value sebesar 0,001. Karena nilai *p*-value jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh IPM terhadap kemiskinan adalah signifikan secara statistik. Nilai *F*-statistik sebesar 18,96 dengan *p*-value 0,001 juga menegaskan bahwa model regresi secara keseluruhan layak dan signifikan. Secara substantif, temuan ini membuktikan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui IPM secara langsung mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Nabire. Hal ini menegaskan bahwa investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan standar hidup layak merupakan strategi yang tepat dan efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan, sekaligus melengkapi hasil analisis sebelumnya bahwa IPM layak untuk diuji lebih lanjut perannya sebagai variabel *intervening*.

Sebelum dilakukan analisis jalur secara lebih mendalam, penting untuk terlebih dahulu menguji apakah variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) benar-benar berperan sebagai variabel mediasi (*intervening*) yang signifikan dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Nabire. Uji yang digunakan untuk keperluan ini adalah Uji Sobel (Sobel Test). Uji Sobel digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi. Dengan kata lain, uji ini menjawab pertanyaan apakah IPM secara statistik layak dianggap sebagai perantara yang memperkuat atau menjelaskan hubungan antara PDRB dan kemiskinan.

Tabel 4. Hasil Uji Sobel

	Masukan:	Statistik uji:	Kesalahan Standar:	nilai p :
A	1.389	Uji Sobel: -4.13345771	0.48322304	0.00003573
B	-1.438	Tes Aroian: -4.12269764	0.48448423	0.00003745
s_a	0.1058	Tes Goodman: -4.14430248	0.48195855	0.00003408
s_b	0.3302	Reset all	Menghitung	

Sumber : Calculation for the Sobel test : An interactive calculation tool for mediation tests (2024)

Tabel 4 di atas menyajikan hasil perhitungan Uji Sobel berdasarkan data yang telah diolah. Perhitungan ini menggunakan koefisien jalur dari hasil analisis regresi sebelumnya, yaitu koefisien pengaruh PDRB terhadap IPM (jalur a) sebesar 1,389 dengan standar error 0,1058, serta koefisien pengaruh IPM terhadap kemiskinan (jalur b) sebesar -1,438 dengan standar error 0,3302. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa statistik uji Sobel (Sobel test statistic) bernilai -4,133 dengan p-value sebesar 0,000. Nilai p-value yang jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (atau 5 persen) mengindikasikan bahwa pengaruh tidak langsung PDRB terhadap kemiskinan melalui IPM adalah signifikan secara statistik.

Secara lebih rinci, nilai absolut statistik uji Sobel sebesar 4,133 juga jauh melampaui nilai kritis Z pada taraf signifikansi 5 persen yaitu 1,96. Dengan demikian, hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh mediasi (tidak ada pengaruh tidak langsung) dapat ditolak. Sebaliknya, hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa IPM berperan sebagai variabel mediasi diterima. Temuan ini memberikan bukti empiris yang kuat bahwa IPM merupakan variabel intervening yang signifikan dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten Nabire. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpengaruh langsung terhadap penurunan kemiskinan, tetapi juga berpengaruh tidak langsung melalui peningkatan kualitas pembangunan manusia terlebih dahulu.

Secara substantif, hasil Uji Sobel ini memiliki makna penting dalam konteks kebijakan pembangunan di Kabupaten Nabire. Pertama, temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia akan kurang efektif dalam menurunkan kemiskinan. Dengan kata lain, PDRB yang meningkat harus diimbangi dengan perbaikan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta standar hidup layak agar dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan lebih optimal. Kedua, uji Sobel yang signifikan ini juga membenarkan bahwa model analisis jalur yang digunakan dalam penelitian ini adalah tepat dan layak, di mana IPM berfungsi sebagai mekanisme transmisi yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah ke depan sebaiknya tidak hanya berfokus pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga secara simultan memperkuat investasi pada sektor-sektor pembangunan manusia agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin.

Setelah diketahui bahwa IPM secara signifikan berperan sebagai variabel mediasi berdasarkan Uji Sobel pada Tabel 4, langkah selanjutnya adalah memahami ringkasan seluruh koefisien jalur yang telah diuji sebelumnya melalui Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Hasil Uji Statistik Model Analisis Jalur

Jalur	Koefisien Jalur	t-stat	Sig.
PDRB → IPM	0.967	13.129	0.000
PDRB → Miskin	-0.853	-5.658	0.000
IPM → Miskin	-0.783	-4.355	0.001

Sumber : data diolah (2024)

Tabel 5 menyajikan hasil uji statistik lengkap dari model analisis jalur yang mencakup tiga hubungan utama, yaitu pengaruh PDRB terhadap IPM, pengaruh langsung PDRB terhadap kemiskinan,

serta pengaruh IPM terhadap kemiskinan. Hasil ini merangkum koefisien jalur (standardized coefficients Beta), nilai t-statistik, serta tingkat signifikansi dari masing-masing hubungan. Berdasarkan tabel ini, jalur pertama yaitu PDRB terhadap IPM memiliki koefisien jalur sebesar 0,967 dengan t-statistik 13,129 dan signifikansi 0,000. Nilai koefisien yang positif dan sangat mendekati 1 ini menunjukkan bahwa pengaruh PDRB terhadap IPM sangat kuat dan searah. Semakin tinggi PDRB, semakin tinggi pula IPM di Kabupaten Nabire. Jalur kedua yaitu PDRB terhadap kemiskinan secara langsung memiliki koefisien jalur sebesar -0,853 dengan t-statistik -5,658 dan signifikansi 0,000. Tanda negatif pada koefisien ini mengindikasikan bahwa peningkatan PDRB akan menurunkan tingkat kemiskinan secara langsung. Jalur ketiga yaitu IPM terhadap kemiskinan memiliki koefisien jalur sebesar -0,783 dengan t-statistik -4,355 dan signifikansi 0,001. Sama seperti jalur kedua, koefisien negatif ini berarti bahwa peningkatan IPM akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Seluruh jalur memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05, sehingga ketiganya dinyatakan signifikan secara statistik.

Dari Tabel 5 di atas, dapat dihitung besarnya pengaruh langsung, tidak langsung dan total dari variabel PDRB dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Nabire sebagai berikut.

Tabel 6. Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Total Dari PDRB dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel	Pengaruh Langsung (ke Miskin)	Pengaruh Tidak Langsung (via IPM)	Total Pengaruh
PDRB	-0,853	$0,967 \times (-0,783) = -0,757$	$(-0,853) + (-0,757) = -1,610$
IPM	-0,783	-	-0,783

Sumber : data diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan beberapa hal, yaitu : *Pertama*, pengaruh langsung PDRB terhadap kemiskinan sebesar -0,853 berarti bahwa setiap peningkatan satu standar deviasi pada PDRB akan menurunkan tingkat kemiskinan secara langsung sebesar 0,853 standar deviasi. *Kedua*, pengaruh tidak langsung PDRB terhadap kemiskinan melalui IPM sebesar -0,757 berarti bahwa selain berpengaruh langsung, PDRB juga berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan secara tidak langsung melalui peningkatan IPM terlebih dahulu, dengan besar kontribusi 0,757 standar deviasi. *Ketiga*, total pengaruh PDRB terhadap kemiskinan adalah sebesar -1,610, yang merupakan penjumlahan dari pengaruh langsung dan tidak langsung. Angka total ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, setiap peningkatan PDRB akan menurunkan kemiskinan sebesar 1,610 standar deviasi. *Keempat*, pengaruh langsung IPM terhadap kemiskinan sebesar -0,783 berarti bahwa setiap peningkatan satu standar deviasi pada IPM akan menurunkan tingkat kemiskinan secara langsung sebesar 0,783 standar deviasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa total pengaruh PDRB terhadap kemiskinan (-1,610) lebih besar dibandingkan pengaruh langsungnya saja (-0,853), yang membuktikan bahwa IPM berperan penting sebagai variabel mediasi yang memperkuat dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Nabire.

3. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, pembahasan ini akan menginterpretasikan temuan-temuan utama secara komprehensif, mulai dari gambaran umum perkembangan variabel, hasil analisis jalur, uji Sobel, hingga perhitungan pengaruh langsung, tidak langsung, dan total pengaruh. Pembahasan ini juga akan mengaitkan temuan empiris dengan teori yang relevan serta membandingkannya dengan berbagai studi empiris terkini dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang dinamika hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kualitas pembangunan manusia, dan kemiskinan di Kabupaten Nabire.

Dari hasil analisis jalur yang dilakukan, pertama-tama ditemukan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan koefisien jalur sebesar 0,967. Temuan ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi Solow (1956) yang menyatakan bahwa peningkatan output ekonomi akan menyediakan lebih banyak sumber daya bagi pemerintah dan masyarakat untuk berinvestasi pada

sektor-sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Ketika perekonomian tumbuh, pendapatan asli daerah meningkat, sehingga alokasi anggaran untuk pembangunan manusia, seperti pembangunan sekolah, pelatihan guru, peningkatan fasilitas kesehatan, serta program perlindungan sosial, dapat diperbesar. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Arrizal (2022) di Kalimantan Tengah yang menemukan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan serta IPM memiliki pengaruh paling besar dalam menurunkan kemiskinan. Selain itu, penelitian Angelia dkk. (2025) di Sumatera Utara juga menegaskan bahwa PDRB merupakan faktor paling dominan dalam menurunkan kemiskinan, meskipun dalam penelitian tersebut IPM tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nabire terbukti menjadi fondasi penting bagi perbaikan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana juga ditemukan oleh Amar & Arkum (2024) di Kabupaten Bangka bahwa PDRB dan IPM bersama-sama berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Selanjutnya, ketika melihat pengaruh langsung PDRB terhadap kemiskinan, hasil analisis menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh langsung, negatif, dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien jalur sebesar $-0,853$. Temuan ini mengonfirmasi teori kemiskinan Lewis (1954) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga secara langsung mampu mengangkat masyarakat dari kemiskinan. Berdasarkan perhitungan dalam bentuk *unstandardized coefficients*, setiap peningkatan PDRB sebesar satu triliun rupiah diperkirakan menurunkan kemiskinan sebesar 2,250 poin persentase. Temuan ini sejalan dengan penelitian Roseline (2023) di Provinsi Lampung yang menemukan bahwa PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, serta penelitian Purnama dkk. (2025) di Lampung yang juga menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa tidak semua studi sepakat dengan temuan ini. Beberapa penelitian justru menemukan arah hubungan yang berlawanan. Misalnya, Susanti (2013) di Jawa Barat menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti peningkatan PDRB justru meningkatkan kemiskinan. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Andykha dkk. (2018) di Jawa Tengah bahwa laju pertumbuhan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, serta Hidayat dkk. (2024) di Lampung yang juga menemukan pengaruh positif PDRB terhadap kemiskinan. Bahkan Sari (2024) di Jawa Timur dalam perspektif ekonomi Islam juga menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang tidak sejalan dengan teori *trickle down effect*. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan sangat bergantung pada bagaimana hasil pertumbuhan tersebut didistribusikan. Di Kabupaten Nabire, temuan positif ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi telah cukup inklusif dan mampu menekan kemiskinan secara langsung, berbeda dengan daerah-daerah di mana pertumbuhan ekonomi justru memperlebar ketimpangan.

Selanjutnya, terkait pengaruh IPM terhadap kemiskinan, hasil analisis menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien jalur sebesar $-0,783$. Temuan ini sangat sejalan dengan teori pembangunan manusia Amartya Sen (1999) yang menekankan bahwa kesejahteraan sejati tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi dari kapabilitas individu yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang baik cenderung lebih mudah mengakses peluang kerja yang lebih baik. Masyarakat yang sehat lebih produktif dan memiliki beban pengeluaran kesehatan yang lebih ringan. Masyarakat yang memiliki standar hidup layak memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap guncangan ekonomi. Ketiga dimensi ini bekerja secara sinergis untuk memutus mata rantai kemiskinan. Temuan ini konsisten dengan hampir seluruh studi empiris yang dikaji. Sayifullah & Gandasari (2016) di Provinsi Banten menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Nasrulloh (2025) di Kabupaten Sampang juga melaporkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan, bahkan menjadi faktor yang lebih dominan dibandingkan PDRB dalam menurunkan kemiskinan. Widyantoro & Agustin (2025) di 34 provinsi di Indonesia menemukan bahwa hanya IPM yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sementara PDRB tidak signifikan. Raharjo (2024) di DIY, Arrizal (2022) di Kalimantan Tengah, Ilmi (2021) di lima provinsi dengan kemiskinan tertinggi, serta Sari (2024) di Jawa Timur semuanya sepakat bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Konsistensi temuan ini di berbagai daerah dengan karakteristik yang berbeda memperkuat keyakinan bahwa investasi pada pembangunan manusia merupakan strategi yang sangat efektif dalam pengentasan kemiskinan, terlepas dari apakah pertumbuhan ekonomi suatu daerah tinggi atau rendah.

Lebih lanjut, terkait peran IPM sebagai variabel mediasi, hasil uji Sobel membuktikan bahwa IPM berperan sebagai variabel intervening yang signifikan dengan nilai statistik uji Sobel sebesar -4,133 dan p-value 0,000. Temuan ini memiliki implikasi teoretis dan praktis yang mendalam. Secara teoretis, hasil ini mengonfirmasi bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak bersifat linier sederhana, melainkan melalui mekanisme transmisi berupa peningkatan kualitas pembangunan manusia. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang ingin berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan harus terlebih dahulu mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bentuk pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang lebih prima, dan standar hidup yang lebih layak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amar & Arkum (2024) di Kabupaten Bangka yang secara implisit menunjukkan bahwa PDRB dan IPM bekerja bersama-sama dalam menurunkan kemiskinan, serta penelitian Arrizal (2022) yang menemukan bahwa IPM merupakan variabel dengan pengaruh paling besar terhadap penurunan kemiskinan. Penelitian Widyantoro & Agustin (2025) juga memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa IPM lebih vital perannya dibandingkan PDRB dalam pengentasan kemiskinan di tingkat nasional. Bahkan di daerah dengan kemiskinan tertinggi seperti Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Gorontalo, Ilmi (2021) menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan sementara PDRB tidak signifikan, yang menegaskan bahwa pembangunan manusia menjadi faktor kunci terutama di daerah-daerah tertinggal.

Terkait perbandingan pengaruh langsung dan tidak langsung, berdasarkan perhitungan yang telah disajikan, pengaruh langsung PDRB terhadap kemiskinan adalah -0,853, sementara pengaruh tidak langsung melalui IPM adalah -0,757, sehingga total pengaruh PDRB terhadap kemiskinan mencapai -1,610. Angka ini menunjukkan bahwa hampir separuh, yaitu sekitar 47 persen, dari total pengaruh PDRB terhadap kemiskinan disalurkan melalui peningkatan IPM terlebih dahulu. Hal ini berarti bahwa IPM memiliki peran yang hampir seimbang dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri dalam upaya menurunkan kemiskinan. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan yang hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kualitas pembangunan manusia akan kehilangan hampir setengah dari potensi dampaknya. Sebaliknya, strategi yang mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut akan jauh lebih efektif. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari berbagai studi empiris. Angelia dkk. (2025) menyarankan kebijakan terintegrasi yang menyinergikan pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan pengurangan pengangguran. Andykha dkk. (2018) merekomendasikan peningkatan koordinasi antar dinas dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pendidikan dan optimalisasi pelayanan kesehatan. Raharjo (2024) menekankan bahwa belanja pemerintah yang tepat sasaran juga berperan penting dalam mendukung penurunan kemiskinan melalui peningkatan IPM. Dengan demikian, kebijakan yang ideal adalah kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan tersebut inklusif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa tidak semua studi menemukan hasil yang identik. Beberapa penelitian justru menemukan bahwa IPM tidak selalu signifikan dalam setiap konteks. Misalnya, Angelia dkk. (2025) di Sumatera Utara menemukan bahwa secara parsial IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, meskipun secara simultan ketiga variabel bersama-sama signifikan. Ngaisah (2023) di Kabupaten Wonosobo bahkan menemukan bahwa IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa meskipun kualitas sumber daya manusia terus meningkat, pengaruhnya terhadap pengurangan kemiskinan belum optimal karena masih rendahnya rata-rata lama sekolah dan pemerataan akses pendidikan serta kesehatan. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas IPM dalam menurunkan kemiskinan sangat bergantung pada kualitas implementasi kebijakan pendidikan dan kesehatan di masing-masing daerah. Di Kabupaten Nabire, temuan yang menunjukkan IPM berperan signifikan sebagai variabel mediasi mengindikasikan bahwa peningkatan IPM yang terjadi selama periode 2010 hingga 2023 telah cukup berkualitas dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, berbeda dengan daerah-daerah di mana peningkatan IPM belum diikuti oleh pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan.

Implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan dari temuan ini sangat relevan dengan rekomendasi dari berbagai studi empiris yang telah dikaji. Pemerintah Kabupaten Nabire perlu terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor unggulan, investasi infrastruktur, serta kemudahan berusaha, sebagaimana disarankan oleh Angelia dkk. (2025) bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan perlu difokuskan pada peningkatan PDRB melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif,

perluasan kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan investasi. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut harus diarahkan agar berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembangunan manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan porsi anggaran yang lebih besar untuk sektor pendidikan, misalnya melalui pembangunan sekolah di daerah terpencil, peningkatan kualitas guru, serta program beasiswa bagi siswa miskin, sebagaimana direkomendasikan oleh Amar & Arkum (2024) untuk memberdayakan masyarakat tidak mampu dengan membangun budaya kemandirian dan mendukung usaha mikro. Di sektor kesehatan, pemerintah perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas, misalnya dengan membangun puskesmas di setiap distrik, menyediakan tenaga medis yang memadai, serta memperluas cakupan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, sesuai dengan temuan Raharjo (2024) bahwa belanja pemerintah yang tepat sasaran mampu mengurangi beban masyarakat miskin. Selain itu, program-program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal usaha bagi UMKM, serta pengembangan sektor pertanian dan agribisnis berbasis komunitas perlu terus diperluas. Dengan strategi yang terintegrasi ini, pertumbuhan ekonomi diharapkan semakin inklusif dan berperan signifikan dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan, sejalan dengan kesimpulan Arrizal (2022) bahwa investasi dalam pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pengelolaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan perluasan lapangan kerja, merupakan kunci utama dalam mengentaskan kemiskinan.

Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nabire berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peningkatan IPM sebagai variabel mediasi. Temuan ini konsisten dengan sebagian besar studi empiris yang menunjukkan peran vital IPM dalam pengentasan kemiskinan, serta memberikan panduan praktis yang konkret bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nabire..

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Nabire, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel intervening. Secara langsung, PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien jalur sebesar $-0,853$, yang berarti setiap peningkatan PDRB akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Namun, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup optimal karena masih terdapat kesenjangan antara laju pertumbuhan ekonomi dan laju penurunan kemiskinan. Penelitian ini juga membuktikan bahwa IPM berperan sebagai variabel intervening yang signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh uji Sobel dengan nilai statistik $-4,133$ dan p -value $0,000$, yang berarti pengaruh tidak langsung PDRB terhadap kemiskinan melalui IPM adalah signifikan secara statistik.

Secara kuantitatif, pengaruh tidak langsung PDRB terhadap kemiskinan melalui IPM mencapai $-0,757$, sehingga total pengaruh PDRB terhadap kemiskinan menjadi $-1,610$. Angka ini mengindikasikan bahwa hampir separuh, yaitu sekitar 47 persen, dari total pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan disalurkan melalui peningkatan kualitas pembangunan manusia terlebih dahulu. Dengan demikian, untuk mencapai penurunan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Nabire, pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia. Kebijakan yang hanya berfokus pada pencapaian target pertumbuhan PDRB tanpa memperhatikan investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan standar hidup layak akan kehilangan hampir setengah dari potensi dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas layanan dasar, sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nabire dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.

2. Saran-Saran

Secara teoritis, penelitian ini telah berhasil membuktikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan sebagai variabel intervening yang signifikan dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten Nabire. Namun, untuk mengembangkan kerangka teori yang lebih komprehensif, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin memediasi atau memoderasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, seperti ketimpangan pendapatan, pengangguran, belanja modal pemerintah, atau desentralisasi fiskal. Selain itu, penting bagi peneliti mendatang untuk menerapkan pendekatan analisis yang lebih beragam, termasuk metode kualitatif seperti wawancara mendalam dan studi kasus, agar dapat menggali perspektif masyarakat secara langsung dan memahami konteks sosial budaya lokal yang mungkin mempengaruhi efektivitas kebijakan pembangunan.

Adapun secara praktis, disarankan untuk pemerintah kabupaten menerapkan kebijakan yang secara simultan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Di sektor pendidikan, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan sekolah di daerah terpencil, peningkatan kualitas guru, serta penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin. Di sektor kesehatan, pemerintah harus meningkatkan akses layanan kesehatan dengan membangun puskesmas di setiap distrik, menyediakan tenaga medis yang memadai, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal bagi UMKM, dan pendampingan petani serta nelayan lokal. Pemerintah juga disarankan membangun kerjasama dengan lembaga swasta, organisasi non-pemerintah, dan perguruan tinggi agar program-program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, H., & Arkum, D. (2024). Pengaruh produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka. *Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, 10(1), 93–111.
- Andykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis pengaruh PDRB, tingkat pengangguran, dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 33(2), 113–123.
- Angelia, T., Hasugian, F. M. S., & Suharianto, J. (2025). Analisis pengaruh pengangguran, IPM dan PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi*, 3(2), 42–62.
- Arofah, F. M. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Variabel Intervening Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Jember (Doctoral Dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).
- Arrizal, L. D. (2022). Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), produk domestik regional bruto (PDRB) dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2014-2021. [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Hidayat, T., Anisanur, T., Mahendra, R. L., & Kurniawan, M. (2024). Analisis pengaruh PDRB, tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2012-2021. *SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(3), 212–228.
- Ilmi, M. B. (2021). Pengaruh PDRB, IPM dan TPT terhadap kemiskinan di lima provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia periode 2010-2019. [Skripsi, IAIN Ponorogo].
- Lewis, W. Arthur. (1954). *Economic Development with Unlimited Supplies of Labour*. Manchester School of Economic and Social Studies, Vol. 22, No. 2, hal. 139–191.
- Nasrulloh, R. I. (2025). Pengaruh pertumbuhan PDRB dan IPM terhadap kemiskinan Kabupaten Sampang Jawa Timur. *Independent : Journal of Economics*, 5(1), 136–146.

- Ngaisah, H. (2023). Analisis pengaruh PDRB, IPM, upah minimum, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Wonosobo tahun 2010-2022. [Skripsi, Universitas Tidar].
- Purnama, D. A., Farhandhanu, F. M., Syafitri, N. E. S., Ramadanti, S., & Sabila, R. (2025). Analisis pengaruh pendidikan, pengangguran, dan PDRB per kapita terhadap pengentasan kemiskinan Provinsi Lampung 2020-2024. *Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan (JSEP)*, 3(3), 687–693.
- Raharjo, A. M. R. (2024). Analisis pengaruh PDRB, IPM, tingkat pengangguran dan belanja pemerintah terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2023. [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Roseline, F. C. (2023). Analisis pengaruh PDRB perkapita, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung [Skripsi, Universitas Lampung].
- Sari, I. R. (2024). Pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dalam perspektif ekonomi Islam [Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember].
- Sayifullah, & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2), 236–255.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.
- Susanti, S. (2013). Pengaruh produk domestik regional bruto, pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Jawa Barat dengan menggunakan analisis data panel. *Jurnal Manajemen Indonesia (JMI)*, 9(1), 1–18.
- Widyantoro, A. A., & Agustin, E. S. A. S. (2025). Pengaruh PDRB provinsi, indeks pembangunan manusia (IPM), upah minimum provinsi (UMP), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap persentase penduduk miskin tingkat provinsi di Indonesia tahun 2019-2023. *Tirtayasa Ekonomika*, 20(1), 113–124.